

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Jhingan dalam Batubara dan Tambunan (2023), negara-negara berkembang ditandai oleh keadaan kemiskinan yang tercermin dalam pendapatan per kapita yang rendah. Menurut Global Finance, saat ini Indonesia dengan nilai GDP-PPP per kapita sebesar US\$15,855 dan berada di peringkat 102. Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang saat ini menghadapi berbagai problematika dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan kondisi sosial. Tingkat pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita yang rendah, bahkan mendekati garis kemiskinan, merupakan salah satu permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia

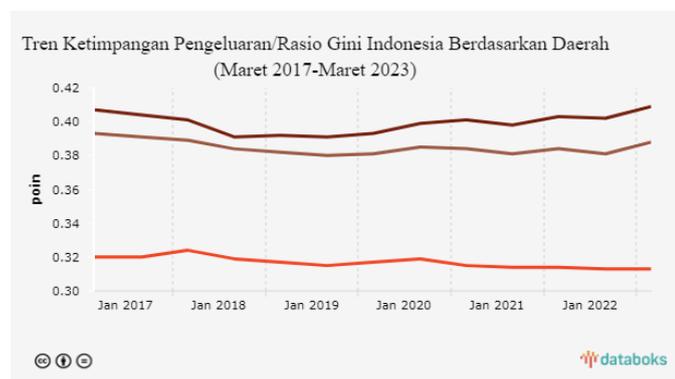
Menurut Todaro dan Smith dalam Priyadi dan Atmadji (2017) hampir seluruh negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang serupa, termasuk kemiskinan, kesehatan yang buruk, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan masalah kriminalitas. Fakta tersebut jelas tercermin dalam infrastruktur yang masih terbatas di beberapa daerah di Indonesia, ketidakmerataan akses pendidikan, serta tantangan kesehatan yang memengaruhi masyarakat di beberapa wilayah. Hal tersebut memerlukan perhatian serius dalam upaya pembangunan.

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) tentang pembangunan mengacu pada upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan

manusia. Dalam perspektif ini, pembangunan berfokus pada perluasan pilihan-pilihan yang tersedia bagi penduduk, dengan penduduk dianggap sebagai tujuan akhirnya, bukan sekadar alat atau instrumen pembangunan itu sendiri. Lebih lanjut, pembangunan dipahami sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan, dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih manusiawi.

Dalam prosesnya, pembangunan tidak selalu merata dan seringkali menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan dalam berkehidupan sosial masyarakat sehari-hari, baik individu maupun kelompok, dimana terjadi ketidakadilan (Islahiha et al., 2019). Secara keseluruhan, ketimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana ketidakseimbangan atau perbedaan yang substansial terjadi di dalam masyarakat, dan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk status ekonomi, sosial, maupun budaya. Perbedaan yang signifikan dapat memicu munculnya ketimpangan dalam berbagai bentuk, mulai dari perlakuan berbeda terhadap individu yang berdasarkan latar belakang berbeda hingga risiko ketidakadilan yang muncul dalam sistem sosial.

**Gambar 1.1 Indeks Rasio Gini Indonesia**



Pada Maret 2023, koefisien Gini Indonesia mencapai 0,388 poin dari skala 0-1 poin, mengalami kenaikan sebesar 0,007 poin dari rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,381. Selain itu, dibandingkan dengan angka Maret 2022 yang sebesar 0,384 poin, rasio Gini Maret 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 0,004 poin. Adapun dari segi daerah, peningkatan rasio Gini di Indonesia terutama berasal dari perkotaan, dengan angka mencapai 0,409 poin pada Maret 2023.

Ketimpangan sosial di Indonesia adalah masalah yang telah lama menjadi perhatian serius dalam perkembangan negara ini. Menurut Tambunan dalam Prasodjo (2017) Ketidaklancaran perdagangan antar daerah (intra-regional trade) merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada ketimpangan ekonomi regional kendala utamanya terletak pada keterbatasan pada komunikasi dan transportasi. Ketimpangan sosial dapat terjadi akibat disparitas aksesibilitas terhadap sumber daya, peluang ekonomi, dan fasilitas pendidikan atau kesehatan. Ketidaksetaraan dalam infrastruktur komunikasi dan transportasi dapat merugikan daerah-daerah yang kurang terhubung, memperdalam kesenjangan antara mereka dan wilayah yang lebih maju secara ekonomi.

Ketimpangan sosial sering kali diakibatkan oleh ketidaksetaraan akses ke pendidikan, dengan masyarakat yang berada di lapisan sosial lebih rendah cenderung menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, yang kemudian memperpanjang jurang sosial. Menurut Todaro dan Smith dalam Nisa dan Samputra (2020) menyatakan bahwa sumber ketimpangan bukan hanya bersumber dari distribusi pendapatan tetapi juga dari pendidikan. Untuk mengatasi ketimpangan sosial ini, dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta,

dan masyarakat sipil untuk menciptakan program-program yang lebih inklusif, memperluas akses terhadap pendidikan.

Menurut Nandika dalam Kurniawati (2022) mengatakan sejak tahun 1972, UNESCO telah mengklaim bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membuka peluang untuk membangun dan memperbaiki kondisi suatu negara. Pendidikan merupakan aspek yang telah disepakati sebagai aspek utama dalam masyarakat manapun. Mutu pendidikan di suatu negara berperan penting dalam menentukan kemajuan negara tersebut. Artinya, tingkat perkembangan suatu negara tercermin dari sejauh mana mutu pendidikan di dalamnya. Pendidikan yang kurang berkualitas dapat menyebabkan negara mengalami kemunduran dan keterbelakang.

Di Indonesia, masih ada beberapa masalah umum dalam bidang pendidikan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik sangat diharapkan karena berperan tidak hanya sebagai alat perubahan bagi generasi mendatang yang akan mewarisi bangsa, tetapi juga sebagai penggerak transformasi nyata.

Menurut Kurniawan (2016), keberhasilan suatu sistem pendidikan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk peserta didiknya, peran guru, kondisi ekonomi, fasilitas, lingkungan, dan sejumlah faktor lainnya. Berbagai faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia sangat beragam, termasuk keterbatasan akses pendidikan, jumlah pendidik yang masih kurang, dan kurangnya fasilitas dalam hal belajar-mengajar.

Di daerah pedesaan, banyak yang berjuang untuk meningkatkan akses pendidikan dengan bermigrasi ke perkotaan dalam pencarian peningkatan pengetahuan. Sejumlah masalah sering menghambat peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Banyak anak yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan yang memadai di daerah seperti ini, dan perlu perhatian lebih dalam hal fasilitas dan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan penyediaan sarana transportasi untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak dan tenaga pengajar.

Dalam penelitian Bakhtiari & Meisami dalam Fairizta dkk (2020) pendidikan berpengaruh langsung terhadap kemiskinan yang berkorelasi negatif dan signifikan. Buruknya pendidikan seringkali menjadi akar masalah kemiskinan yang membelenggu banyak individu dan komunitas. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), kemiskinan adalah situasi di mana rakyat yang miskin tidak memiliki kemampuan untuk memnuhi kebutuhan pokok. Pengukuran ini menilai tingkat kemiskinan dengan melihat pengeluaran atau konsumsi dasar individu, termasuk aspek makanan dan non-makanan, diukur dalam satuan nilai rupiah per orang.

**Tabel 1.1 Jumlah Kemiskinan di Indonesia**

Tahun	Total
September 2020	27,55 Juta Penduduk
September 2021	26,50 Juta Penduduk
September 2022	26,36 Juta Penduduk
Maret 2023	25,90 Juta Penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut Sianturi (2021), faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata, namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri (Ahmad et al., 2023). Menanggulangi serta menghapus kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, baik bagi pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Jika masalah kemiskinan tidak ditangani, dampak yang mungkin timbul termasuk tingginya tingkat pengangguran, penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatnya kecemburuan sosial yang dapat mengakibatkan peningkatan kriminalitas, serta tingkat putus sekolah yang tinggi karena upaya untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan dampak buruk negatif lainnya (Prabowo dan Asfino, 2019).

Kemiskinan yang kronis sering kali memiliki hubungan yang erat dengan kaum atau kelompok marginal. Yakir mendefinisikan kelompok marginal sebagai individu yang berada di tepi atau pinggiran masyarakat. Masyarakat marginal pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga mereka sering tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih besar (Suyanto dalam Ilham dan Farid, 2019). Masyarakat marginal bisa diartikan sebagai kelompok yang secara geografis berada di pinggiran, yang menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses layanan dari

pemerintah daerah/pusat. Kondisi ini membuat mereka rentan terpinggirkan atau mengalami marginalisasi serta diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Marginalisasi yang dialami oleh seseorang atau suatu kelompok pada umumnya memiliki keterbatasan dalam daya upaya atau usaha, ruang gerak yang terbatas, dan kesulitan untuk terserap dalam sektor ketenaga-kerjaan. Dalam situasi ini, dibutuhkan kontribusi dan partisipasi aktif pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup dan mengembangkan keterampilan kerja mereka. Robert Chambers dalam Ilham dan Farid (2019) menyebut pengertian masyarakat marginal sebagai "*deprivation trap*" atau perangkap kemiskinan yang terdiri dari lima unsur utama: a) Kemiskinan itu sendiri; b) Kelemahan fisik; c) Keterasingan atau isolasi; d) Kerentanan; e) Ketidakberdayaan.

Menurut Sandora (2019), anak-anak marginal menunjukkan variasi dalam kondisi mereka, yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti status ekonomi, lokasi geografis tempat tinggal, serta kondisi sosial keluarga dan latar belakang pendidikan. Karakteristik anak-anak marginal ini dapat dikelompokkan dalam tiga aspek utama, yaitu kondisi geografis, kondisi ekonomis, dan kondisi sosial. Misalnya, dari segi geografis, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil sering mengalami kesulitan mendapatkan akses dan teknologi informasi. Dari sisi ekonomi, anak-anak dari keluarga miskin sering kali terlibat sebagai mitra kerja untuk membantu ekonomi keluarga, dengan dampak negatif terhadap peluang pendidikan mereka. Dan dari aspek sosial, tekanan dari lingkungan keluarga yang

tidak harmonis atau tempat tinggal yang tidak kondusif dapat berdampak pada kesejahteraan dan prestasi anak

Anak-anak marginal dapat ditemukan di seluruh dunia, menghadapi ketidaksetaraan dalam pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, tidak terkecuali di negara-negara ASEAN. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari UNICEF diperkirakan sebanyak 55 persen anak di bawah usia 9 tahun dan 40 persen anak usia 10-17 tahun di Laos hidup dalam kemiskinan multidimensional. Angka serupa juga tercatat di Myanmar, di mana 52 persen anak di bawah 9 tahun dan 37 persen anak usia 10-17 tahun menghadapi kondisi serupa. Di Vietnam, sebanyak 45 persen anak di bawah 9 tahun dan 35 persen anak usia 10-17 tahun juga mengalami kemiskinan multidimensional. Dengan perhitungan kasar, perkiraan menyebutkan hampir 25 juta anak di tujuh negara ASEAN yang memiliki data terkini, seperti Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam, hidup dalam kemiskinan multidimensional.

Anak-anak marginal di Indonesia berhadapan dengan beragam risiko serius yang mengancam kesejahteraan dan masa depan. Risiko utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan ekonomi keluarga, ketidakpastian dalam akses pendidikan yang berkualitas, dan minimnya fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, anak-anak ini juga rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, pernikahan dini, serta pekerjaan anak yang berbahaya. Keterbatasan akses mereka terhadap layanan sosial, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak, meningkatkan risiko perpetuasi siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan.

**Tabel 1.2 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Nasional 2020**

No	Jenis Masalah	Jumlah (Anak)
1	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	6.572
2	Anak Jalanan	8.320
3	Balita (dari keluarga miskin, dibuang, tidak terdokumentasi, membutuhkan keluarga pengganti)	8.507
4	Anak Memerlukan Pengembangan Fungsi Sosial (AMPFS)	92.861
5	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	2.791
6	Anak Terlantar	64.053
Total		183.104

Sumber: kemensos.go.id

Anak-anak yang hidup dalam situasi marginal memiliki potensi besar untuk menjadi anak-anak rawan. Mereka cenderung memiliki status inferior dan marginal, ciri-ciri yang seringkali melekat pada anak-anak yang berada dalam kelompok rawan. Kelompok anak-anak ini sering dianggap sebagai bagian dari marginal karena seringkali mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka rentan untuk diperlakukan tidak adil dan bahkan kerap kali kehilangan hak-hak serta kebebasannya.

Anak-anak marginal di Indonesia berhadapan dengan beragam risiko serius yang mengancam kesejahteraan dan masa depan. Risiko utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan ekonomi keluarga, ketidakpastian dalam akses pendidikan yang berkualitas, dan minimnya fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, anak-anak ini juga rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, pernikahan dini, serta pekerjaan anak yang berbahaya. Keterbatasan akses mereka terhadap layanan

sosial, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak, meningkatkan risiko perpetuasi siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Peran negara dan pemerintah dalam mengatasi isu anak marginal memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak terlantar, mencakup aspek jasmani, rohani, dan sosial. Ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan perhatian khusus kepada anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Pemerintah berperan penting melalui berbagai kebijakan dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Melalui Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia mengakui perlunya perlindungan khusus terhadap anak-anak sebagai kelompok yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental.

Dalam rangka memberikan perlindungan, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menetapkan hak-hak konstitusional anak, yang melibatkan aspek-aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Pemerintah juga berperan dalam menyusun kebijakan dan program-program konkretnya, seperti pemberian bantuan sosial, pendampingan, dan fasilitas kesejahteraan untuk mendukung anak-anak marginal. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia. Meskipun provinsi ini memiliki banyak potensi ekonomi dan sumber daya alam, ada sejumlah masalah yang

menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di wilayah ini yang menyebabkan adanya kaum marginal.

Kaum marginal di Jawa Timur adalah kelompok yang berjuang untuk memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya, layanan, dan peluang ekonomi. Baik itu masyarakat desa yang terpencil, suku-suku minoritas, atau individu dengan tingkat pendidikan rendah, mereka harus menghadapi tantangan beragam, mulai dari keterbatasan akses pendidikan hingga minimnya peluang pekerjaan.

**Tabel 1.3 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak Nasional**

No	Provinsi	Angka Kemiskinan
1	Jawa Timur	4,18 Juta Penduduk
2	Jawa Barat	3,89 Juta Penduduk
3	Jawa Tengah	3,79 Juta Penduduk
4	Sumatera Utara	1.2 Juta Penduduk
5	Nusa Tenggara Timur	1.1 Juta Penduduk
6	Sumatra Selatan	1 Juta Penduduk
7	Lampung	0,97 Juta Penduduk
8	Papua	0,91 Juta Penduduk
9	Banten	0,82 juta Penduduk
10	Aceh	0,8 Juta Penduduk

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Jika ditelusuri lebih dalam, data dari BPS menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, mencapai 4,18 juta orang. Angka ini tidak hanya mewakili fakta statistik semata, melainkan juga mengekspos dinamika kompleks ketidaksetaraan sosial di tingkat provinsi, yang khususnya termanifestasi dalam populasi kaum marginal. Sebagaimana telah disoroti sebelumnya,

kemiskinan memainkan peran sentral sebagai pemicu munculnya kelompok-kelompok ini. Dengan mengacu pada data statistik mengenai penduduk miskin yang disediakan oleh BPS, disimpulkan bahwa setiap tahunnya muncul generasi anak marginal yang terpinggirkan secara sosial. Mereka yang tumbuh di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini terjebak dalam berbagai tantangan, yakni terbatasnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan minimnya peluang ekonomi yang tersedia.

**Tabel 1.4 Jumlah Anak Terlantar di Provinsi Jawa Timur**

<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pacitan	-
2	Ponorogo	983
3	Trenggalek	19.633
4	Tulungagung	323
5	Blitar	143
6	Kediri	435
7	Malang	4.788
8	Lumajang	147
9	Jember	385
10	Banyuwangi	81
11	Bondowoso	-
12	Situbondo	1.821
13	Probolinggo	1.402
14	Pasuruan	192
15	Sidoarjo	243
16	Mojokerto	5.301
17	Jombang	94
18	Nganjuk	3.111
19	Madiun	402
20	Magetan	5.497
21	Ngawi	8.849
22	Bojonegoro	39
23	Tuban	685
24	Lamongan	3.108
25	Gresik	46.360
26	Bangkalan	61
27	Sampang	6.777

28	Pamekasan	-
29	Sumenep	498
30	Kota Kediri	59
31	Kota Blitar	237
32	Kota Malang	2
33	Kota Probolinggo	284
34	Kota Pasuruan	27
35	Kota Mojokerto	120
36	Kota Madiun	282
37	Kota Surabaya	6.349
38	Kota Batu	-
<b>Total</b>		118.718

Sumber: [jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id)

Menurut data dari Dinas Sosial Jawa Timur, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Timur mencapai 600 ribu orang, termasuk 118 ribu anak yang terlantar. Kota Surabaya, salah satu kota metropolitan Indonesia yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, bisnis, dan keuangan, serta ibu kota Provinsi Jawa Timur, juga menghadapi fenomena masalah sosial. Salah satunya adalah masalah anak-anak marginal, yang tetap menjadi isu yang belum teratasi dengan baik dan merupakan tantangan besar bagi pemerintah kota Surabaya hingga saat ini. Sebagai contoh termuat pada kutipan berita Timesindonesia (2020):

“Surabaya - Mayoritas profesi dari warga Kampung 1001 Malam adalah pemulung dan pengemis. Selain itu pekerjaan-pekerjaan serabutan seperti penambal ban, tukang, dan penjual makanan adalah kegiatan yang sehari-hari dilakukan.”

(<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/290401/melihat-kehidupan-kaum-marginal-di-kampung-1001-malam-surabaya-di-tengah-pandemi> diakses pada 27 Januari 2024 pukul 18.58 WIB)

**Gambar 1.2 Potret Anak Marginal Di Surabaya**

Sumber: TIMESINDONESIA

Pada tahun 2023, Kota Surabaya meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak untuk keenam kalinya berturut-turut dalam kategori utama, berdasarkan penilaian pemenuhan hak anak, aspek kesehatan, dan berbagai kriteria lainnya. Walaupun Kota Surabaya telah beberapa kali meraih penghargaan sebagai kota layak anak, permasalahan yang terkait dengan anak marginal masih belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini dapat dibuktikan melalui data mengenai anak-anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di Surabaya yang disediakan oleh Dinas Sosial Surabaya melalui website <https://opendata.jatimprov.go.id/>.

**Tabel 1.5 Angka Anak Terlantar di Surabaya 2021**

Jenis Kelamin Anak	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	3.386	50,3%
Perempuan	3.348	49,7%
Total	6.734	100%

Sumber: Dinas Sosial Surabaya

Menurut Putra (2020) anak terlantar merujuk pada anak yang, karena suatu alasan, orang tua mereka mengabaikan atau tidak mampu memenuhi kewajiban mereka, sehingga kebutuhan anak, baik secara fisik, spiritual, maupun sosial, tidak

tercukupi. Anak terlantar ini mencakup mereka yang berusia 5-18 tahun dan mengalami berbagai situasi sulit seperti kemiskinan, sakitnya salah satu dari orang tua atau wali, meninggalnya salah satu atau kedua orang tua atau wali pengasuh, ketidakharmonisan dalam keluarga, atau ketiadaan pengasuh. Akibatnya, kebutuhan dasar anak tidak dapat terpenuhi dengan sewajarnya, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

Selain menghadapi kondisi terlantar, anak-anak marginal di Surabaya juga berada dalam risiko tinggi terhadap eksploitasi. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang berjudul "Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya)" yang dilaksanakan oleh Andi Aysha Zalika Ardita Putri pada tahun 2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tindakan eksploitasi yang dialami anak-anak, terutama mereka yang hidup di jalanan. Bentuk eksploitasi ini mencakup pemaksaan anak jalanan untuk terlibat dalam sektor informal, seperti mengemis dan mengamen. Selain itu, praktik pemaksaan, intimidasi, dan pengambilan yang dilakukan oleh orang tua dan preman yang memiliki pengaruh di lingkungan anak jalanan dalam kegiatan ekonomi menjadi permasalahan serius.

Anak-anak marginal, yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, menemukan harapan dan dukungan melalui peran aktif lembaga swadaya masyarakat. Menurut Salamon & Anheier dalam Buonomo et al., (2020) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi swasta, independen, dan memiliki pemerintahan sendiri, berdasarkan partisipasi sukarela, yang keuntungannya tidak dibagikan kepada individu atau pemilik, namun

diinvestasikan kembali dalam misi organisasi, yang mewakili kontribusi terhadap kepentingan publik atau kesejahteraan umum.

LSM ini biasanya berfokus pada isu-isu yang signifikan bagi masyarakat dan sering terlibat dalam upaya advokasi, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, atau penyediaan bantuan sosial. Kelangsungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah diatur dalam konstitusi dan sistem hukum Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan dasar hukum utama yang mengatur LSM di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prosedur pendirian, pengelolaan, dan aktivitas organisasi kemasyarakatan, termasuk LSM. Untuk beroperasi di Indonesia, organisasi kemasyarakatan harus terdaftar dan tunduk pada peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Partisipasi *Civil Society* dalam penyelesaian masalah anak marginal memiliki keterkaitan yang erat dengan teori *governance*. Dalam konteks *good governance*, partisipasi yang kuat dari berbagai pihak, termasuk LSM dan masyarakat umum, dianggap sebagai komponen penting. Menurut lembaga administrasi negara, konsep *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang kokoh, bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Hal ini dicapai dengan menjaga interaksi yang sinergis antara domain-domain negara, sektor swasta, dan *civil society* (Sedarmayanti, 2004).

Menurut buku "Pengantar Ilmu Politik" karya Suryanto (2018), *civil society* menekankan pada ruang di mana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dengan semangat toleransi di wilayah atau negara tertentu. Di dalam

ruang tersebut, masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, mengurangi terjadinya konflik, mengatasi masalah perekonomian serta masalah sosial, dimana peranan yang dilakukan tersebut sejalan dengan cita-cita Indonesia yakni makmur, adil dan berdaulat.

Yayasan Alit (Arek Lintang) merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tugas pokok pada perlindungan atas hak anak serta pengembangan kesetaraan bagi kelompok anak marginal. Didirikan secara resmi pada 22 April 1999, Yayasan Alit telah memperoleh status badan hukum dengan daftar yayasan nomor AHU-0013874.AH.01.12.TAHUN 2019, bukti lengkapnya terdapat pada lampiran 2. Sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berdedikasi, Yayasan Alit mendedikasikan dirinya untuk melibatkan diri secara aktif dalam upaya memahami, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang berada dalam kondisi marginal termasuk Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak dari Keluarga Miskin, Anak Korban Kekerasan atau Eksploitasi. Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menekankan perlunya melindungi hak-hak anak, mencegah eksploitasi, dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap mereka.

Pendirian Yayasan Alit tidak hanya tercermin sebagai suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk mempromosikan kondisi dan hak-hak kelompok anak marginal. Kelompok ini mencakup anak-anak jalanan yang rentan, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, dan anak-anak yang merupakan bagian dari kelompok minoritas. Yayasan Alit menjalankan berbagai

program pemberdayaan dan advokasi dengan tujuan utama membangun panggung bagi anak-anak ini untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Yayasan Alit merancang dan melaksanakan program-program yang tidak hanya menyentuh aspek dasar kehidupan anak, tetapi juga berupaya mendorong potensi. Pada setiap program yang dijalankan Yayasan Alit, pembiayaan mengandalkan pada donator tetap yaitu Die Sternsinger Kindermissionwerk dan Schmitz Stiftungen. Pendekatan ini mencakup inisiatif konkret seperti pemberian akses pendidikan yang luas dan pembinaan psikososial yang bertujuan untuk membentuk individu yang tangguh dan berpotensi. Saat ini, Yayasan Alit membina sejumlah anak yang berkedudukan di Surabaya melalui program-programnya. Berikut programnya.

**Tabel 1.6 Program Kegiatan Yayasan Arek Lintang Surabaya**

<b>Program Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
Kelas Literasi	Kegiatan belajar mengajar non formal untuk memperkenalkan hal-hal yang belum dipelajari di sekolah
Kelas Simple Skill	Mengasah keterampilan minat dan bakat
Peralatan Olahraga Anak (POA)	Kegiatan olah tubuh dan kebugaran
Urban Farming	Dari tahap pembibitan sampai tiba waktu panen
Perlindungan Anak (Perlina)	Langkah-langkah perlindungan diri anak dan remaja

Sumber: Yayasan Arek Lintang Surabaya

Yayasan Alit (Arek Lintang) tidak hanya berkomitmen pada penyelenggaraan program-program pemberdayaan di satu lokasi, tetapi juga berhasil menjalankan inisiatifnya di berbagai wilayah. Hingga saat ini, yayasan ini telah merentangkan jejaknya ke 12 desa yang tersebar di 3 provinsi di Indonesia.

Prestasi pendiri Yayasan Arek Lintang, Yuliati Umrah, yang masuk dalam “Daftar 80 Pemimpin Strategis Dunia” yang diumumkan oleh *Bureau Of Educational And Cultural Affairs* pada tahun 2020, menjadi titik sorot yang luar biasa dan mengesankan. Keberhasilannya sebagai pemimpin strategis tidak hanya mencerminkan kemampuan individunya, tetapi juga menyoroti signifikansi dan dampak positif dari Yayasan Arek Lintang.

Dalam konteks penelitian ini, prestasi tersebut menjadi keunikan yang memperkaya latar belakang penelitian. Kesuksesan Yuliati Umrah tidak hanya membanggakan sebagai pencapaian pribadi, tetapi juga menunjukkan bahwa organisasi yang dipimpinnya, Yayasan Arek Lintang, memiliki peran strategis yang penting dalam memberdayakan anak-anak marginal. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa upaya pemberdayaan anak marginal melalui yayasan ini memperoleh pengakuan internasional, menjadikannya subjek penelitian yang relevan dan bernilai dalam merinci dampak positif yang dihasilkan oleh Yayasan Arek Lintang dalam menciptakan perubahan yang berarti bagi anak-anak yang berada dalam kelompok marginal.

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan terkait anak marginal, maka penulis tertarik untuk memperdalam lebih jauh tentang seperti apa peranan Yayasan Arek Lintang Surabaya untuk memberdayakan anak-anak marginal dan membantu anak marginal mencapai tahap perubahan sosial melalui penelitian yang berjudul “Peran Yayasan Arek Lintang (ALIT) Dalam Pemberdayaan Anak Marginal di Kota Surabaya”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melalui penjelasan latar belakang informasi yang disampaikan, rumusan masalah yang bisa dianalisis lebih lanjut pada penelitian ini yaitu : bagaimana peran yang dilakukan Yayasan Arek Lintang (ALIT) dalam pemberdayaan anak marginal di Kota Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan adanya pendalaman analisis di penelitian ini adalah terdeskripsinya peran Yayasan Arek Lintang (ALIT) dalam pemberdayaan anak marginal di Kota Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
- b. Dapat menambah wawasan bagi penulis karena secara langsung melakukan analisis terhadap peranan Arek Lintang Surabaya dalam pemberdayaan anak marginal.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pendalaman analisis dalam penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan bahan literatur keustakaan sebagai bahan kajian dalam penelitian yang sejenis